



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL (BKPM)

**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IWAN SURYANA
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 87648

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 577.500.000
6. Tanah Seluas 23 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 172.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 375.500.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.



250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 21.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. 5.440.116.697

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 847.310.576

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 11.433.927.273

**III. HUTANG**

Rp. 650.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 10.783.927.273

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.